



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASWANDI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 917554

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **770.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/173 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
2. Tanah Seluas 1100 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, WARISAN Rp. 95.000.000
3. Tanah Seluas 19090 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
4. Tanah Seluas 680 m2 di KAB / KOTA PESISIR SELATAN, WARISAN Rp. 55.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **81.500.000**

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SOULD SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	852.500.000
III. HUTANG	Rp.	370.505.800
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	481.994.200

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.